

## TINDAK LANJUT TEMUAN BPK, INSPEKTORAT MATARAM: BANSOS HARUS DISALURKAN DALAM BENTUK BARANG

**LombokPost**-Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan DPRD Kota Mataram menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan tersebut belum dikembalikan.

"Tidak ada pengembalian, karena hanya persoalan administrasi," kelir Inspektur Inspektorat Kota Mataram Hj Baiq Nelly Kusumawati.

Munculnya persoalan administrasi tersebut setelah Inspektorat melakukan klarifikasi. Mulai dari anggota dewan, OPD yang menyalurkan, dan penerima Bansos tersebut

"Masing-masing penerima sudah menerima bantuan tersebut. Sesuai dengan proposal yang diajukan," terangnya.

Sebelumnya, pada temuan BPK ada sebanyak Rp 590 juta penyaluran Bansos yang tidak diyakini kebenarannya. Bansos itu disalurkan melalui dana Pokir DPRD berinisial NE. Dewan tersebut menyalurkan kepada 590 orang. Per orang mendapatkan Rp 1 juta.

Penyalurannya disalurkan melalui Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram. Disdag menyalurkan dana Pokir itu dengan mengelompokkan masing-masing penerima menjadi 10 orang. Jadi saat dana disalurkan ke masing-masing kelompok sebesar Rp 10 juta.

Namun secara administratif, proposal dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) hanya mengatasnamakan satu individu atau ketua kelompok. Sebanyak 59 kelompok belum memiliki daftar nama seluruh anggota.



HJ BAIQ NELLY KUSUMAWATI

Dari proses pemeriksaan yang dijalankan BPK, ditemukan Bansos tersebut tidak diyakini kebenarannya. Karena, masing-masing anggota kelompok menerima tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Diduga dipotong ketua kelompok dan sebagainya.

"Itu kita klarifikasi kembali kita lakukan. Menyatakan semua kelompok mendapatkan manfaat," ujarnya.

Terkait dengan adanya dugaan pemotongan yang dilakukan masing-masing ketua kelompok berdasarkan temuan BPK, ditindaklanjuti seperti apa? Nelly menepisnya. Hasil klarifikasi, semua sudah dikembalikan ke masing-masing penerima.

"Jadi, tidak ada persoalan lagi," bebarnya.

Untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut, pihaknya sudah menjalankan. Khusus untuk penyaluran Bansos tidak boleh lagi diberikan dalam bentuk uang. "Makanya sekarang pemberian Bansos harus dalam bentuk barang. Itu bagian dari kita menjalankan rekomendasi BPK," ujarnya.

## TINDAK LANJUT TEMUAN BPK, INSPEKTORAT MATARAM: BANSOS HARUS DISALURKAN DALAM BENTUK BARANG

Tujuannya supaya menghindari adanya temuan tahun berikutnya. Sebab, penyaluran Bansos dalam bentuk uang sangat rentan terjadi penyalahgunaannya.

"Kita sudah ambil langkah cepat untuk mengantisipasi itu. Sudah dipastikan nanti Bansos disalurkan dalam bentuk barang," ujarnya.

Namun, ada pengecualiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Sudah ada khusus mengatur mengenai apa saja yang bisa disalurkan dalam bentuk uang," tandasnya. **(arl/r3)**



Hj Baiq Nelly Kusumawati